

**Menyongsong Timor-Leste Baru: Tanggung Jawab Bersama Lembaga Agama
Konferensi Antar-agama di Timor-Leste, Baucau 21 Juni 2006
Pat Walsh**

Konferensi ini terselenggara di saat Timor-Leste dan lembaga-lembaganya, termasuk komunitas agama, menghadapi tantangan besar. Negara termuda di dunia ini telah terperosok jatuh ketika tengah belajar berdiri sendiri. Digambarkan sebagai krisis menyedihkan oleh Presiden Xanana Gusmão dalam pidatonya baru-baru ini di parlemen, situasi ini adalah gabungan tragis antara isu-isu mendasar tentang kemanusiaan, kemasyarakatan, ekonomi, kelembagaan, legal, dan politik. Kegagalan kepemimpinan politik dan runtuhnya sistem dan nilai-nilai kewarganegaraan juga telah memicu rasa kehilangan kepercayaan diri yang serius. Apa tanggung jawab bersama lembaga agama kepada rakyat dan Negara Timor-Leste pada persimpangan kritis ini?

Lembaga agama di Timor-Leste bukanlah pihak yang asing bagi krisis dan memiliki peran penting dan berpengaruh di Timor-Leste pada titik ini. Sebagaimana di masa lalu, rakyat bersama-sama kembali datang kepada lembaga agama ini dan, dengan cara terbaik, lembaga-lembaga agama telah menjawab dengan menyediakan bantuan kemanusiaan baik di berbagai institusi Katolik, Mesjid An-Nuur, dan situs-situs Protestan di sejumlah tempat di Dili. Hal ini menanamkan kepercayaan pada lembaga agama sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi dengan cara lain. Manusia tidak hanya hidup karena makanan saja. Hal spiritual juga harus dipupuk, khususnya di masa krisis, penuh keraguan dan kehilangan kepercayaan. Pada 1998, CNRT mengembangkan pernyataan misi yang inspirasional untuk Timor-Leste yang dinamakan Magna Carta. Mungkin lembaga agama dapat mengambil langkah serupa dengan konteks sekarang dengan tujuan meningkatkan semangat dan membangun kembali antusiasme dan komitmen terhadap proyek pembangunan bangsa kita.

Dalam makalah pendek ini saya ingin mengusulkan beberapa ide tentang apa yang mungkin diharapkan oleh lembaga agama dalam dokumen ini. Pertama-tama, saya ingin membuat empat poin. Pertama, tidak dianjurkan bahwa Timor-Leste harus kembali ke papan gambar dan mengembangkan cetak biru yang sama sekali baru. Modifikasi atas status quo mungkin diinginkan berdasarkan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari krisis sekarang ini, tapi tujuan latihan ini seharusnya adalah membangun kembali komitmen dan antusiasme bagi dasar-dasar sistem yang ada agar tidak terbalik. Tujuannya seharusnya mengembalikan keyakinan yang tercabik selama membangun kemerdekaan, bukannya menciptakan ketidak-pastian yang lebih jauh. Kedua, penegasan kembali keimanan dalam diri kita dan kebijakan serta lembaga kita secara kolektif seharusnya jauh dari sikap kritis, militan, atau kemenangan. Tak seorang pun dari kita yang memiliki semua jawaban atas semua masalah. Ketiga, inisiatif apa pun untuk menciptakan sebuah pernyataan visi yang segar untuk Timor-Leste harus bersifat kolaboratif dan partisipatif. Sementara inisiatif ini mungkin dipimpin oleh sebuah gugus tugas antar-agama, inisiatif ini tetap harus dikembangkan dengan cara demokratis dan konsultatif untuk memastikan input maksimum serta rasa memiliki pada berbagai komunitas yang lebih luas. Menyatukan komunitas lebih menjamin hasil yang dicapai dapat diterima daripada memberikan sesuatu dari atas dan berharap mereka yang melakukan. Terakhir,

seharusnya tidak ada ilusi sehingga situasi dapat diobati dengan cepat atau dengan mudah atau bahwa sebuah pernyataan visi akan cukup. Dibutuhkan komitmen sumber-sumber daya, kreativitas, dan usaha yang berkelanjutan di semua sisi untuk menyembuhkan Timor-Leste dan kembali ke jalur tapi konsensus tentang dasar-dasar merupakan awal yang penting.

Berikut ini ada lima prinsip utama yang mungkin memberi informasi tentang praktik lembaga agama yang berkelanjutan di Timor-Leste dan input Anda untuk pernyataan visi di masa depan. Kelimanya adalah: hak dan nilai-nilai asasi manusia universal; solidaritas terhadap orang miskin; rekonsiliasi; kemitraan; integritas.

1. Menjunjung nilai-nilai universal

Lembaga-lembaga agama terdipanggil untuk mempromosikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia. Meskipun itu bukan satu-satunya *raison d'être* mereka, panggilan ini fundamental bagi jasa mereka terhadap kemanusiaan. Rekam jejak mereka dalam hal ini merupakan subyek besar dan sejarah Timor-Leste menunjukkan bahwa lembaga agama terkadang gagal dan kadang berhasil dalam menanggung misi ini. Kepercayaan terhadap misi ini khususnya penting dalam konteks sekarang ketika poin-poin referensi jelas, masih berupa poin-poin dalam dunia yang berubah ini, dibutuhkan. Di masa yang penuh ketidak-pastian dan disorientasi, komunitas akan diuntungkan dengan ekspresi dukungan yang kuat dan otoritatif terhadap hak-hak asasi manusia, peraturan hukum, keadilan, partisipasi, non-kekerasan, saling menghargai, komunitas, dan kebaikan bersama.

Timor-Leste telah mengalami keruntuhan hukum, keteraturan, nilai-nilai moral, dan kepemimpinan politik. Sebagaimana disebutkan, hal ini mengikis kepercayaan diri. Rakyat Timor-Timur banyak melakukan pencarian jiwa dan bertanya-tanya tentang hal-hal fundamental termasuk manfaat konstitusi, relevansi parlemen, kekuatan presiden, kemampuan mekanisme akuntabilitas yang ada, superfisialitas komitmen terhadap aturan hukum. Timor-Leste bukanlah satu-satunya masyarakat di daerah ini yang mengalami pertumbuhan yang menyakitkan. Thailand, salah satu contoh, juga tengah dalam cengkraman krisis politik yang melibatkan perdana mentrinya dan sejauh ini menghindari kembali pada praktik pemerintahan militer seperti yang terjadi selama ini.

Sebagaimana di Thailand, jawaban di Timor-Leste bukanlah mengambil jalan pintas ekstra-yudisial. Namun, orang mendengar begitu banyak usulan: konstitusi harus ditunda; presiden harus menyiapkan kekuatan tambahan; Perdana Menteri harus disingkirkan dari kantornya; keadaan ini membolehkan kudeta; administrasi pemerintah harus diserahkan ke dunia internasional; ratusan kejahatan yang dilakukan baru-baru ini harus dimaafkan dan dilupakan. Banyak preseden dalam sejarah Timor-Leste untuk respons-respons semacam ini, misalnya: berbagai kudeta masa lalu di Portugal, Indonesia, dan Timor-Leste sendiri. Namun, perbaikan-perbaikan instan bukanlah jawaban atau tujuan jangka panjang Timor-Leste. Timor-Leste memiliki alasan untuk berterima kasih kepada presidennya karena tidak panik dan tetap menjunjung konstitusi, proses yang layak, dan nilai-nilai fundamental yang memperkuat Timor sejak kemerdekaan. Namun demikian,

hal ini seharusnya tidak dilihat sebagai akhir persoalan atau sebagai alasan untuk puas atau tak beraksi di pihak pemerintah atau partai Fretilin. Fretilin selama ini melihat dirinya sebagai penjaga kepentingan bangsa. Fretilin memiliki tanggung jawab sejarah dan diharapkan dapat bergabung bersama rakyat Timor lainnya dalam pencarian diri. Diharapkan agar lembaga agama akan selalu menjunjung proses layak atau aturan hukum dan bahwa mereka akan melepaskan beban mereka di balik sebuah program pendidikan sipil yang segar untuk menjunjung prinsip-prinsip ini dan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kelembagaan yang telah dipicu oleh krisis.

2. Solidaritas dengan orang miskin

Selama beberapa minggu dan bulan terakhir, puluhan ribu rakyat Timor yang ketakutan mengungsi ke lembaga-lembaga agama di Dili. Banyak yang menjadi tuna wisma, banyak yang mengalami teror tengah malam dan serangan dari tetangga, beberapa telah lari dari atau diancam dengan hukuman mati. Respons lembaga-lembaga agama—Katolik, Protestan, dan Muslim—telah memberi kesan mendalam dan inspirasional. Nabi Muhammad pernah berkata, "Tindakan paling mulia adalah menyenangkan hati orang lain, memberi makan yang kelaparan, menolong yang susah, meringankan beban yang menderita, dan menyelamatkan. Kita terus melihat "tindakan-tindakan mulia" ini di Dili di mana lembaga agama telah membuka pintu dan hati mereka dengan tanpa beban.

Solidaritas terhadap orang miskin adalah fundamental, prinsip bersama dan tiang lembaga agama. Melayani orang miskin dan hak asasi mereka harus tetap menjadi kontribusi distinctive dalam membangun Timor-Leste yang baru, baik di masa darurat dan sebagai program praktek pelayanan sosial yang terus berlanjut. Solidaritas dengan orang miskin juga membutuhkan advokasi. Tidak cukup melayani diam-diam. Lembaga agama harus melakukan intelektual signifikan dan sumber-sumber lainnya untuk memastikan bahwa isu-isu dan usulan kebijakan telah diteliti dengan baik dan dapat diadvokasikan dengan yang berwenang. Pemerintah telah mengumumkan mereka akan membangun rumah-rumah baru untuk mereka yang kehilangan rumah dalam kerusuhan baru-baru ini. Lalu apa peran lembaga-lembaga agama dalam meyakinkan bahwa rumah-rumah ini memenuhi standar minimum, telah layak, dan menjamin keamanan kepemilikan maupun kepemilikan fisik? Solidaritas dengan orang-orang miskin juga menantang kita untuk bekerja bersama mereka mengembangkan kapasitas, martabat, kepercayaan diri, dan kemerdekaan. Presiden Xanana Gusmao tidak pernah lelah mengingatkan kita tentang pentingnya DYD—do it yourselves development (pengembangan diri sendiri). Rakyat tidak boleh menunggu secara pasif agar segalanya dikerjakan untuk mereka; mereka sendirilah yang harus berpartisipasi, mengorganisasi, mobilisasi.

Di masa awal krisis ini, penyebabnya dibebankan hampir seluruhnya pada pemuda yang digambarkan oleh warga senior Timor dalam bahasa "hooligans", "pemuda berandalan", gerombolan, dan vandal. Tak diragukan lagi bahwa, seperti tahun 2002, pemuda yang terpengaruh bergabung dan melakukan kejahatan yang mana mereka harus bertanggung jawab. Kita muak dan jijik, untuk tidak menyebut malu, atas perilaku mereka yang luar biasa destruktif dan ekstrem—yang sering mengorbankan mereka yang tidak berdaya, mereka yang malang tak berdosa. Tapi suara-suara dalam tradisi Don Bosco juga harus

didengarkan yang bertanya siapa para pemuda ini, mengapa mereka terputus, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka sehingga mereka menjalani hidup konstruktif dan kekerasan tidak berulang? Menganggap mereka jahat sama dengan menghapus mereka. Lembaga-lembaga agama yang otentik akan mempromosikan aset berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas yang melihat kekuatan, bukan hanya kelemahan, dan bertanya apa yang bisa dilakukan dengan segala macam tambahannya. Para pemuda ini merasa ditinggalkan. Tak ada proyek sosial yang lebih penting bagi kita daripada menolong mereka menemukan andil dalam proyek pembangunan bangsa yang lebih luas dan menghubungkan mereka kembali kepada jalur utama. Kita berharap mereka akan dibicarakan dan situasi mereka akan disampaikan dalam pernyataan visi apa pun.

3. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dan komunitas adalah konsep fundamental dalam teologi. Komunitas agama memiliki banyak hal yang bisa disumbangkan untuk rekonsiliasi di Timor-Leste. Meskipun mereka mewakili pilihan dan perbedaan denominasional, keanggotaan mereka melampaui perbedaan sosial, ekonomi, dan politik dan menawarkan potensi untuk interaksi, pembangunan komunitas dan promosi budaya toleransi dan penilaian perbedaan yang mana tanpanya kita semualah yang lebih miskin. Sebagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bangsa Indonesia baru-baru ini bahwa hak budaya adalah termasuk hak asasi manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini adalah pengingat pahit bahwa perpecahan masih ada di masyarakat Timor dan telah menemukan ekspresi bari dalam kekerasan dan agresi bahkan di antara sesama bangsa Timor di lingkungan yang sama yang telah tinggal berdampingan selama bertahun-tahun. Kekerasan antar-Timor ini secara signifikan telah melemahkan, kalau tidak menghancurkan, hubungan dan kepercayaan antara sesama warga Timor. Kehilangan modal sosial berupa kepercayaan adalah kemunduran besar yang akan membutuhkan upaya berkelanjutan untuk membangun kembali. Satu ketakutan adalah Dili akan melihat lebih banyak dinding-dinding berhiaskan kaca pecah sedang dibangun, simbol dari kecemasan internal kita. Lembaga agama, yang telah memberi contoh dengan bekerja bersama, memiliki banyak hal untuk disumbangkan pada proses penyembuhan dan reintegrasi ini. Semua itu dibutuhkan dalam jangka panjang. Pemandangan anak-anak kecil bermain dengan senjata dan berteriak "Viva Lorosae", dibiarkan oleh orangtua mereka, mengimplikasikan pembagian ini telah diwariskan kepada generasi berikut. Selama beberapa hari terakhir para pemuda di Dili Barat memajang spanduk ofensif di kaki bukit Malinamuk. Tertulis sebagian: "Viva Distritu Sanulu! Viva Loro Monu! Viva Joventudi Monu!" Lalu ada lanjutan tulisan bahwa Firaku tidak diterima di Dili dan harus kembali ke distrik mereka. Para pelajar SMA dari Sekolah Menengah Katolik bercerita pada saya tanpa merasa malu bahwa mereka membantu menyiapkan spanduk itu.

Laporan CAVR Chega! tidak lama lagi akan disebarakan kepada komunitas di semua distrik oleh badan yang didirikan oleh Presiden Xanana Gusmao untuk tujuan ini, Sekretariat Teknis Pasca-CAVR (STP-CAVR). Sekretariat ini akan dengan tangan terbuka menyambut bantuan lembaga agama baik dalam hal diseminasi dan sosialisasi Laporan. Laporan ini berisi periode 1974-1999 tapi rekomendasi dan pesan-pesan utamanya seluruhnya relevan dengan krisis sekarang dan amat persuasif karena mereka

berakar pada pengalaman Timor sendiri. Mereka menyertakan pembelaan kuat untuk komitmen nasional pada non-kekerasan dan kontrol masyarakat sipil terhadap aparat keamanan.

Laporan CAVR juga mengusulkan bahwa dibutuhkan lembaga seperti STP-CAVR dan merekomendasikan bahwa Parlemen memandatkan sebuah lembaga yang sesuai untuk melaksanakan konsultasi nasional di bawah perlindungan Presiden dengan peran, *terms of reference*, dan kemungkinan semacam itu. Dengan memandang kerusakan dalam relasi komunitas baru-baru ini, saya menyarankan agar konferensi ini mendukung rekomendasi ini sebagai salah satu hasil.

Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengacuk rekomendasi lain dalam Chega! Yang, meski diarahkan spesifik pada Gereja Katolik, juga relevan dengan komunitas agama lainnya. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat ditemukan pada halaman 158, 164-167, dan 178 dalam Executive Summary edisi bahasa Inggris. Singkatnya, rekomendasi itu mendesak Gereja, bergandengan dengan komunitas agama lain, terus melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia melalui advokasi publik. Akhirnya, STP-CAVR akan menulis kepada para pemimpin Gereja untuk membawa rekomendasi-rekomendasi spesifik ini kepada perhatian mereka.

4. Kemitraan

Jelaslah bahwa lembaga agama dan pemerintah merupakan pemegang andil utama di Timor-Leste. Jelas juga bahwa Timor-Leste adalah masyarakat baru pasca-konflik yang rentang dan rapuh terhadap kejutan. Karenanya hal itu menjadi penting, khususnya di titik pembangunan sekarang ini, bahwa kedua "Golkar" Timor memiliki hubungan baik berdasarkan kepercayaan dan kerja sama, bukan keraguan dan kompetisi. Timor-Leste harus bernapas dengan kedua paru-parunya.

Namun demikian, isu hubungan "gereja-negara" telah diabaikan sejak kemerdekaan dan layak mendapat perhatian sistematis dari kedua partai ini. Hubungan ini diganggu oleh sisa mabuk dari masa lalu dan retorika yang sering kali berbantahan dari kedua sisi. Tapi hubungan ini masih diabaikan bukan karena negara bersikap bermusuhan dengan agama dan sebaliknya, melainkan karena lembaga yang terlibat telah betul-betul sibuk sejak 1999 dengan tugas yang bertubi-tubi dalam membangun atau membangun kembali lembaga mereka. Presiden Xanana Gusmao, misalnya, hanya membuat referensi sekilas kepada komunitas agama dalam buku terbarunya *Timor Lives!*, kumpulan 30 pidato yang dia sampaikan sejak kemerdekaan. Banyak hal yang dapat dipelajari dari empat model yang dialami atau ditawarkan pada masa lalu Timor.

Di masa Portugis pra-1974, lembaga agama non-lokal utama—Gereja Katolik—adalah bagian dari pemerintah. Model ini dibentuk untuk melegitimasi status quo yang tidak adil dan bukan demi rakyat. Ini bukan hubungan yang sesuai dengan Timor-Leste kontemporer yang berkomitmen menjunjung pemisahan gereja dengan negara berdasarkan Konstitusi Bagian 45. Selama periode Indonesia pasca-1975, gereja menentang pemerintah meskipun ada usaha resmi untuk menyatukannya. Aspek-aspek dalam model ini perlu dipertahankan, khususnya kemerdekaan lembaga agama,

kedekatan dengan rakyat, dan advokasi publik untuk mempromosikan dan membela nilai-nilai fundamental. Tapi tak ada dasar sekaran ini untuk melanjutkan penolakan fundamental dan permusuhan yang pernah dimiliki gereka terhadap pemerintah saat periode Indonesia. Model ketiga dapat diidentifikasi dari periode transisi menuju kemerdekaan yang melihat keterkaitan minimal antara gereja dan negara. Administrasi PBB secara efektif mengabaikan lembaga agama dan mereka akhirnya menarik diri dari keterlibatan eksternal untuk fokus pada tantangan lembaga internal. Tidak satu pun dari sikap itu yang kreatif atau valid di Timor-Leste kontemporer. Pemisahan gereja dan negara tidak dimaksudkan sebagai perceraian di mana mantan pasangan mundur mengisolasi diri dan tidak berhubungan lagi satu sama lain. Terakhir, ada usulan-usulan sejak kemerdekaan agar para pemimpin agama dapat bertindak sebagai pemimpin politik. Ini adalah usulan yang sangat akrab bagi kaum muslim juga kristen. Namun, tidak disebutkan keahlian bagaimana yang mungkin harus dimiliki calon. Dalam bentuk eksterm, usulan ini menolak pemisahan agama dan Negara dan berusaha mengonsentrasikan kekuasaan absolute dalam satu lembaga sehingga merugikan kebebasan beragama, pluralisme, dan demokrasi.

Tantangan bagi pemerintah dan lembaga agama adalah mengembangkan paradigma baru yang sesuai dengan Timor-Leste pasca-kemerdekaan yang demokratis. Konferensi ini mungkin bisa mempertimbangkan dialog tentang subyek ini melalui program riset dan seminar. Pada prinsipnya, hubungan seharusnya didasarkan pada rasa saling menghargai, pengakuan jelas terhadap legitimasi satu sama lain, kemandirian dan peran sendiri tapi juga tentang niat baik dan keinginan untuk bekerja sama demi kebaikan semua. Melakukan praktek ini tidak bisa langsung. Namun, kemitraan antara lembaga agama dan pemerintah atas nama rakyat Dili yang terdislokasi menunjukkan apa yang mungkin.

5. Integritas Institusional

Lembaga agama memiliki tradisi panjang dalam menetapkan standar untuk orang lain. Mereka juga bisa berkontribusi dengan memberi contoh standar-standar ini dalam lembaga mereka sendiri. Sementara mereka berbeda dalam banyak hal dengan pemerintah, ini seharusnya tidak menjadi alasan mereka tidak menjadi apa yang mereka tuntut dari pemerintah: kompeten, konsultative, transparan, dapat bertanggung jawab secara keuangan, berorientasi rakyat, bebas dari arogansi dan menghargai hak asasi manusia. Dengan menyediakan contoh-contoh praktik lembaga agama yang terbaik dapat menunjukkan bagaimana semua hal ini bekerja dan meningkatkan kredibilitas mereka sebagai agen perubahan.

Kesimpulannya, saya ingin menegaskan kembali dua poin yang saling berhubungan di atas. Pertama, untuk mendorong lembaga agama agar tidak menyerah dalam proyek membangun bangsa Timor-Leste dan bersatu membela dan mempromosikan proses demokrasi berdasarkan peraturan hukum yang telah menjadi pijakan Timor-Leste. Kedua, untuk mendorong Anda lebih memfokuskan energi dan kreativitas pada pengembangan ekonomi dan menciptakan peluang kerja untuk anak-anak muda kita. Lembaga agama memiliki kredibilitas, sumber daya, dan pengaruh yang signifikan di Timor-Leste. Di masa tantangan ini saya yakin bahwa Anda terpanggul untuk menggunakan sumber daya ini untuk tujuan kembar dari demokrasi dan pembangunan. Demokrasi dan pembangunan

layaknya sayap sebuah burung: tanpa kedua sayap burung tidak dapat tinggal landas, melayang di udara, atau terbang lurus.

Makalah ini adalah kontribusi individual dan tidak mencerminkan pandangan organisasi mana pun. Pat Walsh adalah penasihat senior di STP-CAVR, Dili.

Email: padiwalsh@yahoo.com.au. Laporan CAVR Chega! dapat diakses dalam tiga bahasa di <http://www.cavr-timorleste.org>